



ORIENTASI PENYUSUNAN RPJMD DAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri





KEBIJAKAN PENYUSUNAN RPJMD TAHUN 2025-2029

HUBUNGAN KINERJA ANTAR DOKRENDA



Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

RPJPD

(Arah Kebijakan dan
Sasaran Pokok)

Arah & Tahapan Pembangunan Daerah	I (5)	II (10)	III (15)	IV (20)

Sasaran pokok RPJPD
ditandai dgn target indikator
makro

DITURUNKAN

DIJABARKAN

RPJMD

(Pencapaian Target
Tujuan dan Sasaran)

Sasaran, program dan kerangka pendanaan	I	II	III	IV	V

Sasaran, program dan kegiatan/ subkeg PD	I	II	III	IV	V

Renstra PD

(Pencapaian Target
Tujuan dan Sasaran)

DITURUNKAN

DIJABARKAN

RKPD

(Pencapaian Target
Tujuan dan Sasaran
RPJMD sesuai Tahun
Rencana)

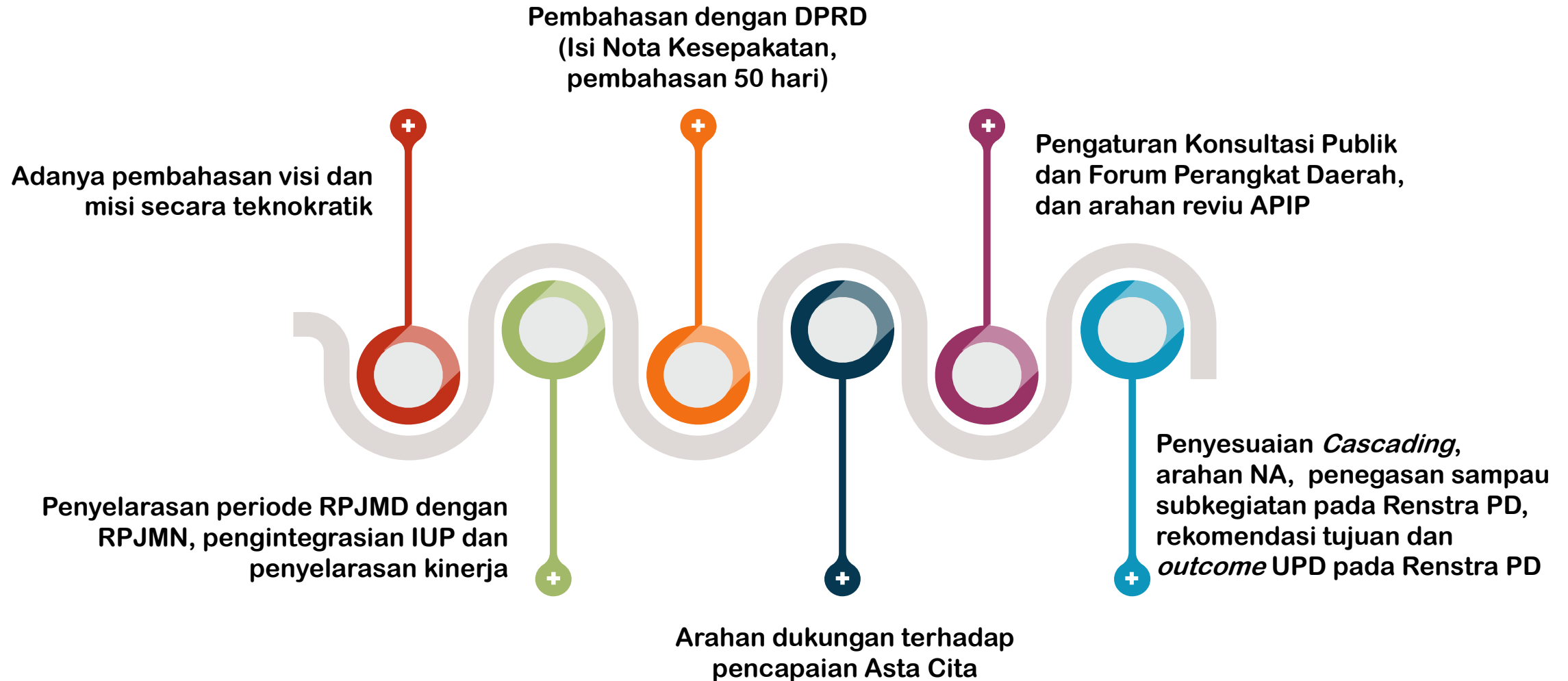
Program dan kegiatan/subkegiatan Pembangunan Daerah	1	2	3		12

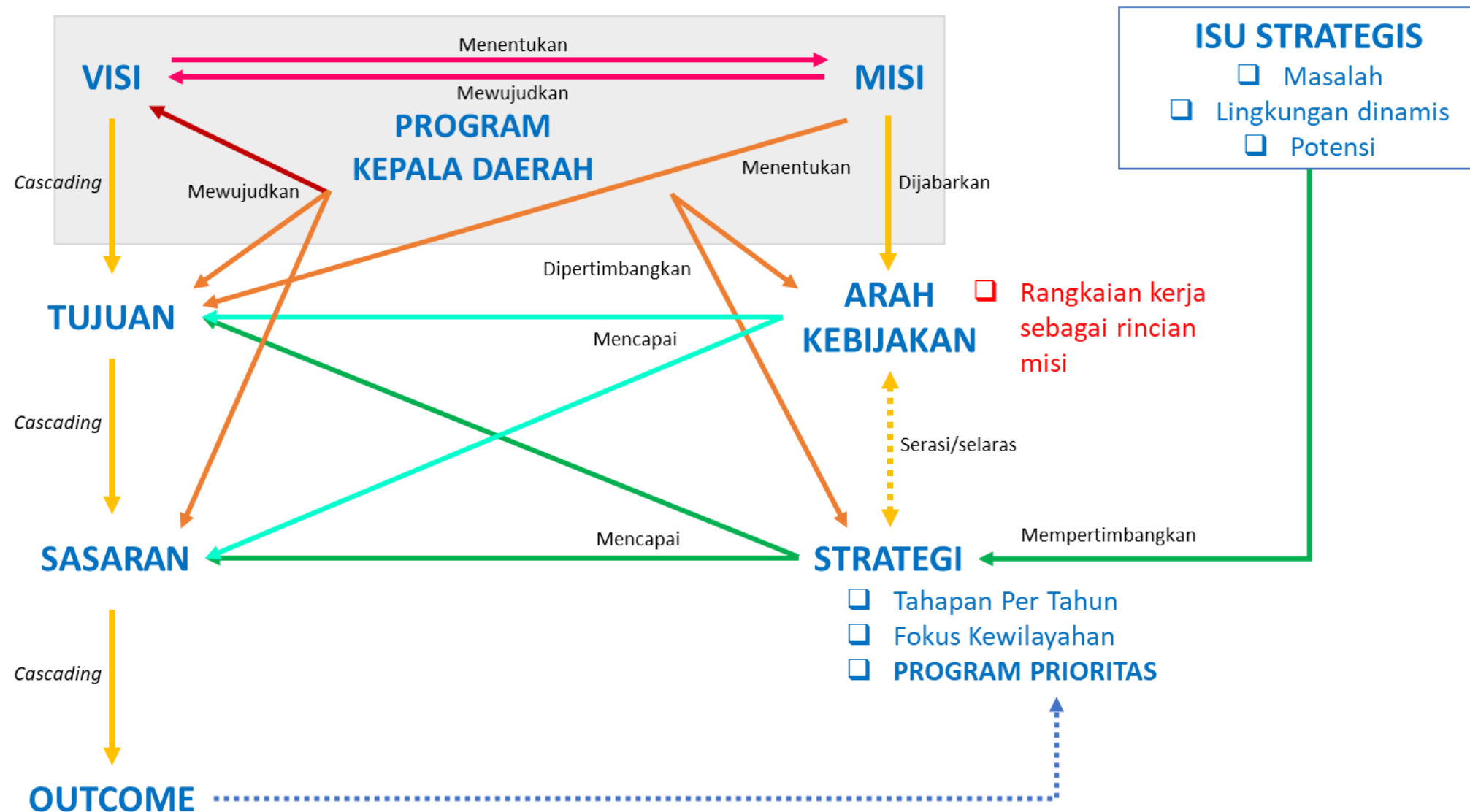
Program dan keg./subkeg. Pemb Daerah	1	2	3		12

Renja PD

(Pencapaian Target
Tujuan dan Sasaran
Renstra sesuai Tahun
Rencana)

BEBERAPA PENGATURAN BARU DALAM PEDUM

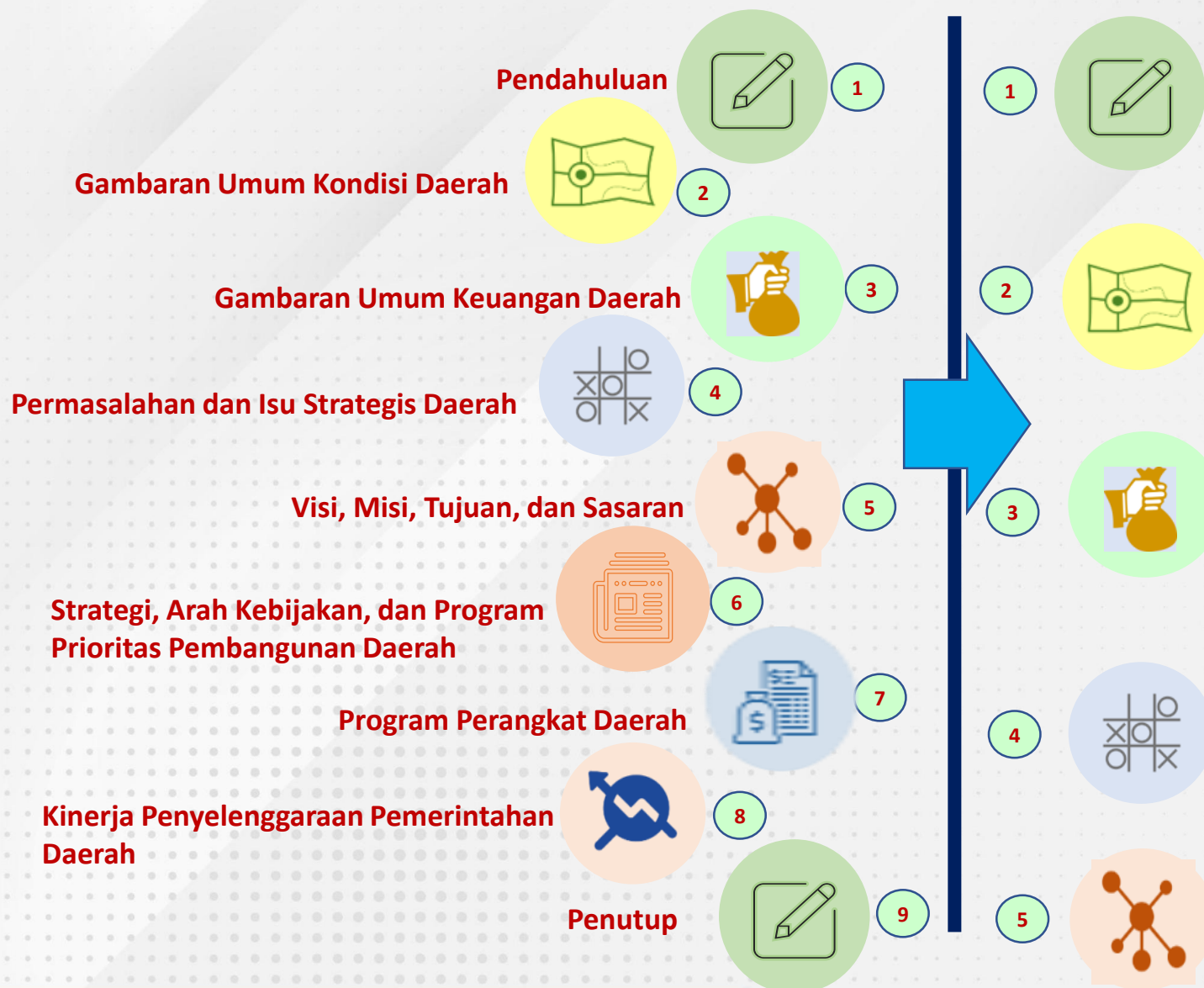




SISTEMATIKA RPJMD



Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH



Pendahuluan

Latar belakang, dasar hukum, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, sistematika penulisan

Gambaran Umum Daerah

Data yang bersifat *given* dan hasil evaluasi kinerja; Proyeksi potensi anggaran, nb: rupiah dalam dok. perencanaan $\neq$ rupiah dalam dok. anggaran; Masalah disimpulkan dari gambaran umum; Isu strategis terdiri atas: masalah + isu strategis lingkungan+isu potensi lainnya

Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Cascading dari visi misi sampai dengan program prioritas kepala daerah; Strategis dan arah kebijakan serta sekumpulan program prioritas; Program prioritas untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah

Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

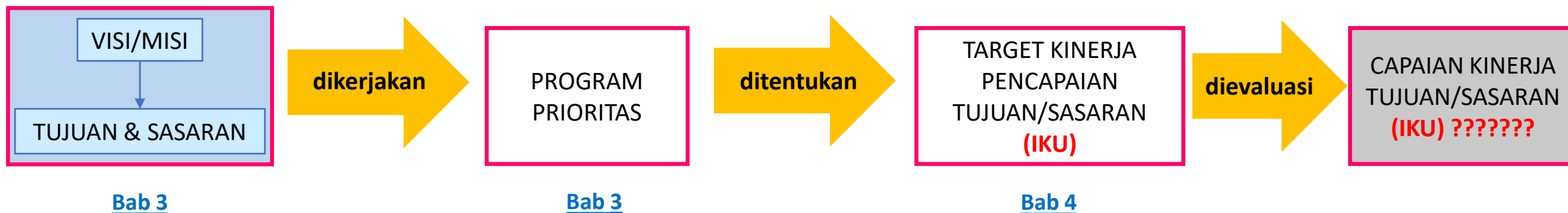
Program seluruh perangkat daerah beserta proyeksi pendanaannya; Target kinerja pencapaian tujuan selama 5 tahun (IKU) dan target kinerja sebagai daerah otonom (IKD)

Penutup

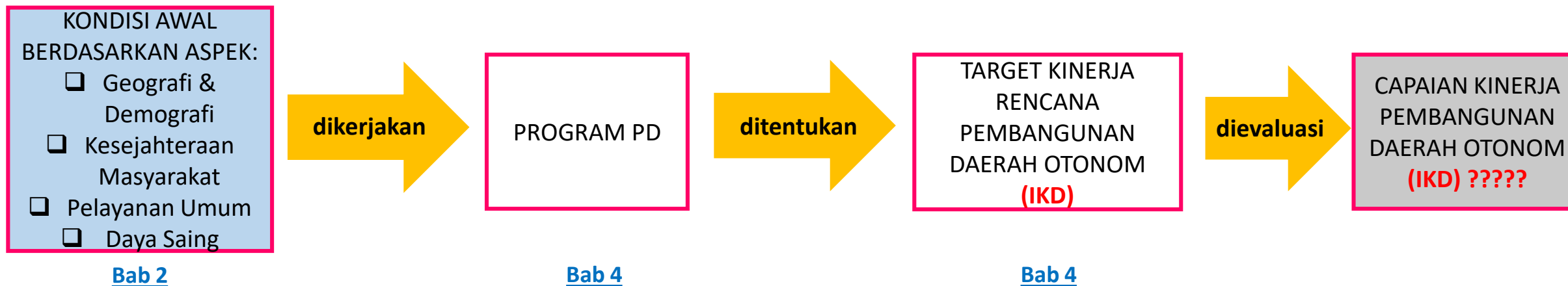


KONSEP KINERJA RPJMD

A Kinerja Mewujudkan Visi/Misi Kepala Daerah



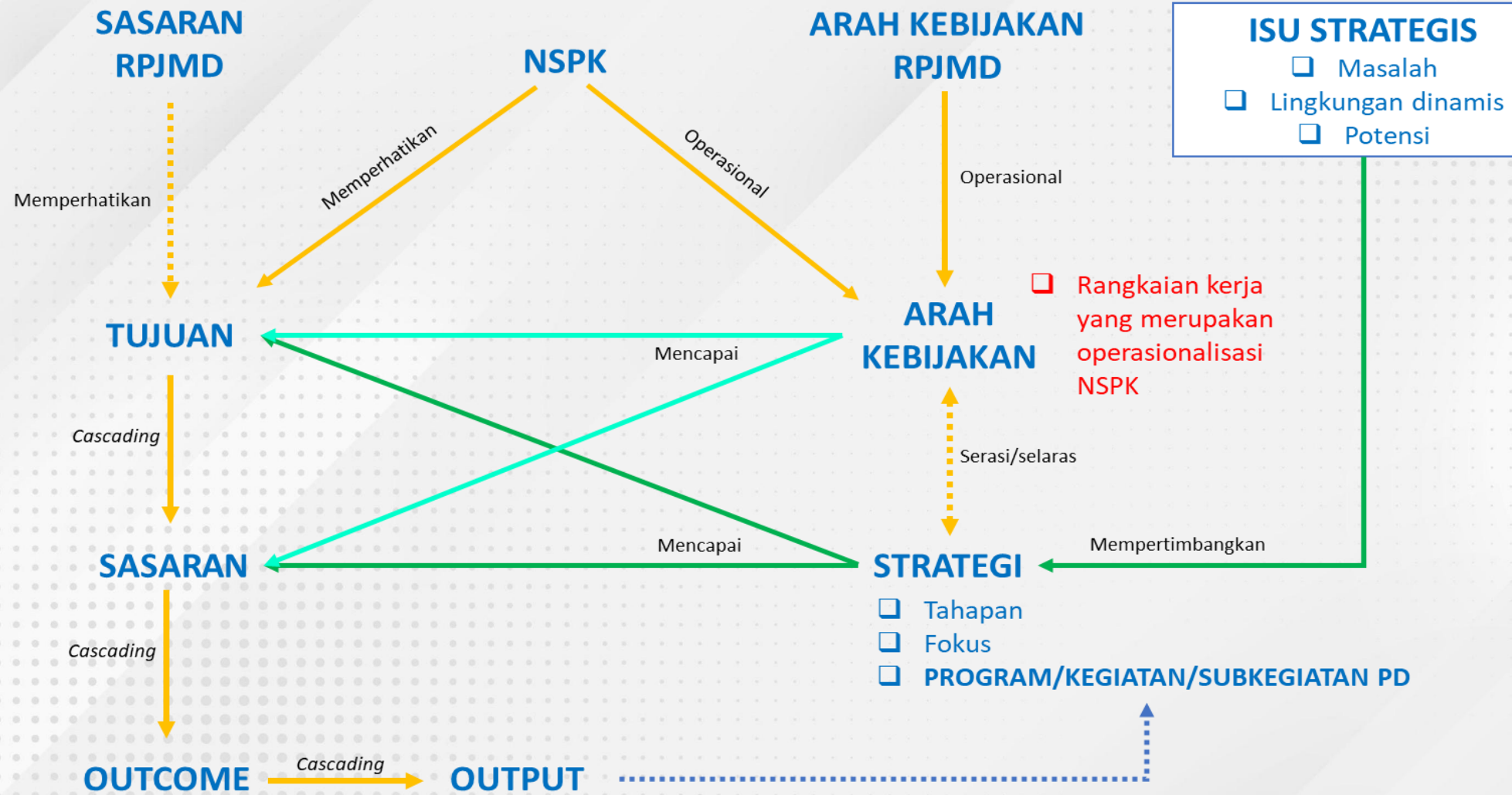
B Kinerja Pembangunan Daerah Otonom



KONSEP PENYUSUNAN RENSTRA PD



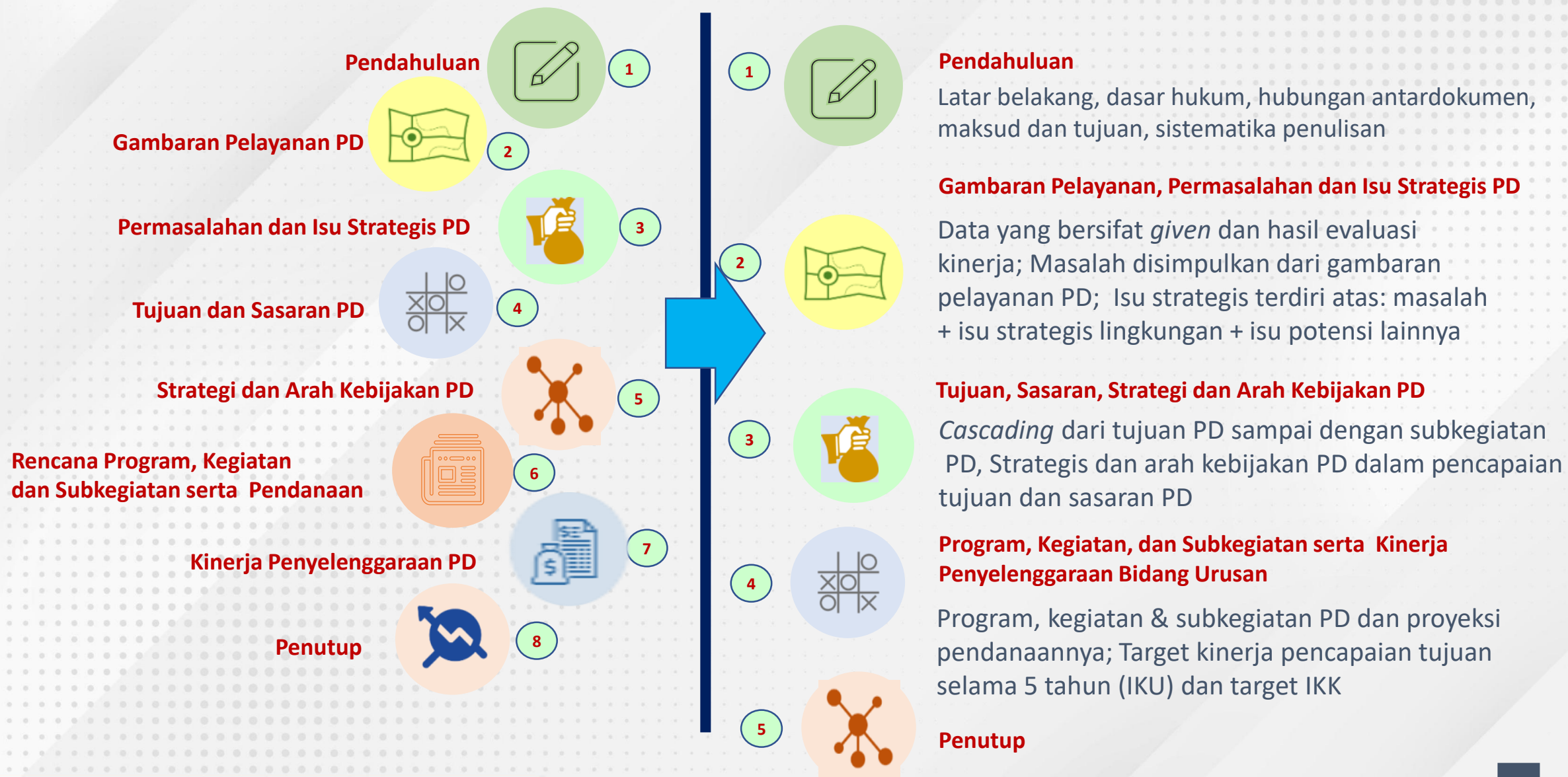
Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH



SISTEMATIKA RENSTRA PD



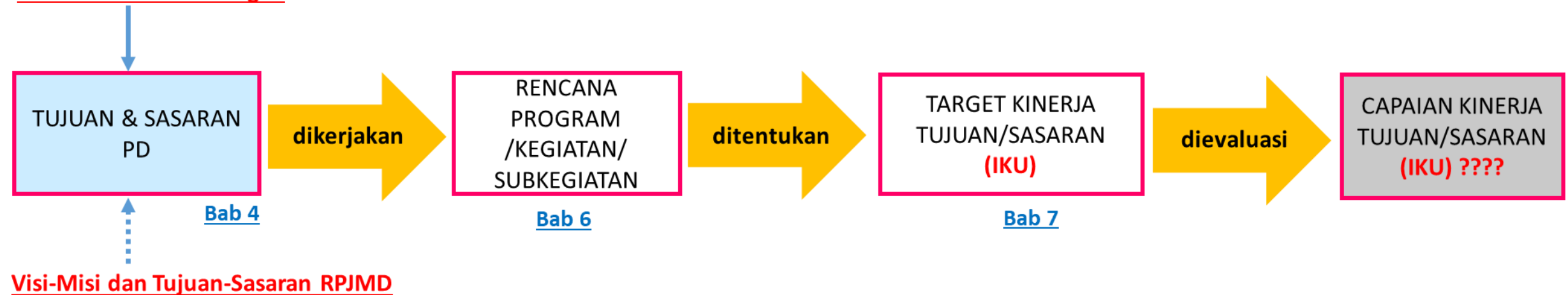
Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH



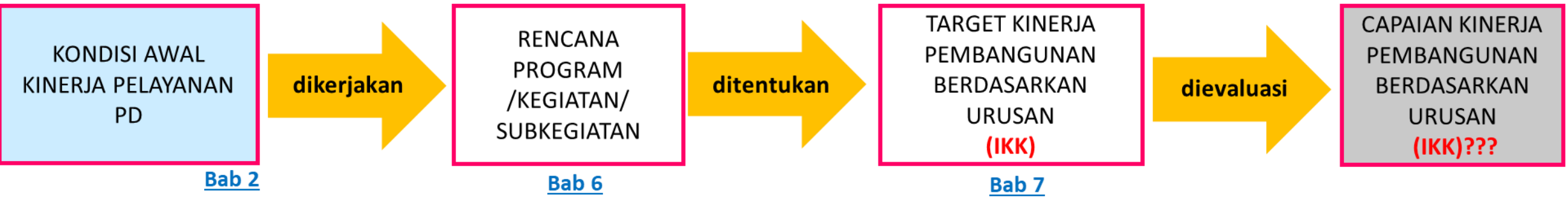
KONSEP KINERJA RENSTRA PD

A Kinerja Kepala Perangkat Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran

NSPK sesuai kewenangan



B Kinerja Daerah Berdasarkan Urusan yang Menjadi Tanggung Jawab PD



RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD 2025-2029



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 Juni 2024

Nomor : 000.8.2.2/4075/Bangda
Sifat : Satu berkas
Lampiran : Penyusunan Rancangan Teknokratik
Hal : RPJMD Tahun 2025-2029

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di
Seluruh Indonesia

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang;
2. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045,

dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah agar segera menyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.
2. Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi salah satu acuan dalam penyusunan visi, misi, dan program prioritas calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada 2024.
3. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan ketentuan antara lain:

- a. dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan menggunakan pendekatan teknokratik;
 - b. mengacu pada Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045;
 - c. diselesaikan paling lambat pada minggu keempat bulan Juli Tahun 2024, untuk selanjutnya dikoordinasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah untuk menjadi acuan sebagaimana angka 2 (dua);
 - d. diunggah ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
4. Tata cara penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dalam lampiran surat ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,



Ditandatangani secara Elektronik oleh:
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri

Ir. Restuardy Daud, M.Sc

Tembusan:

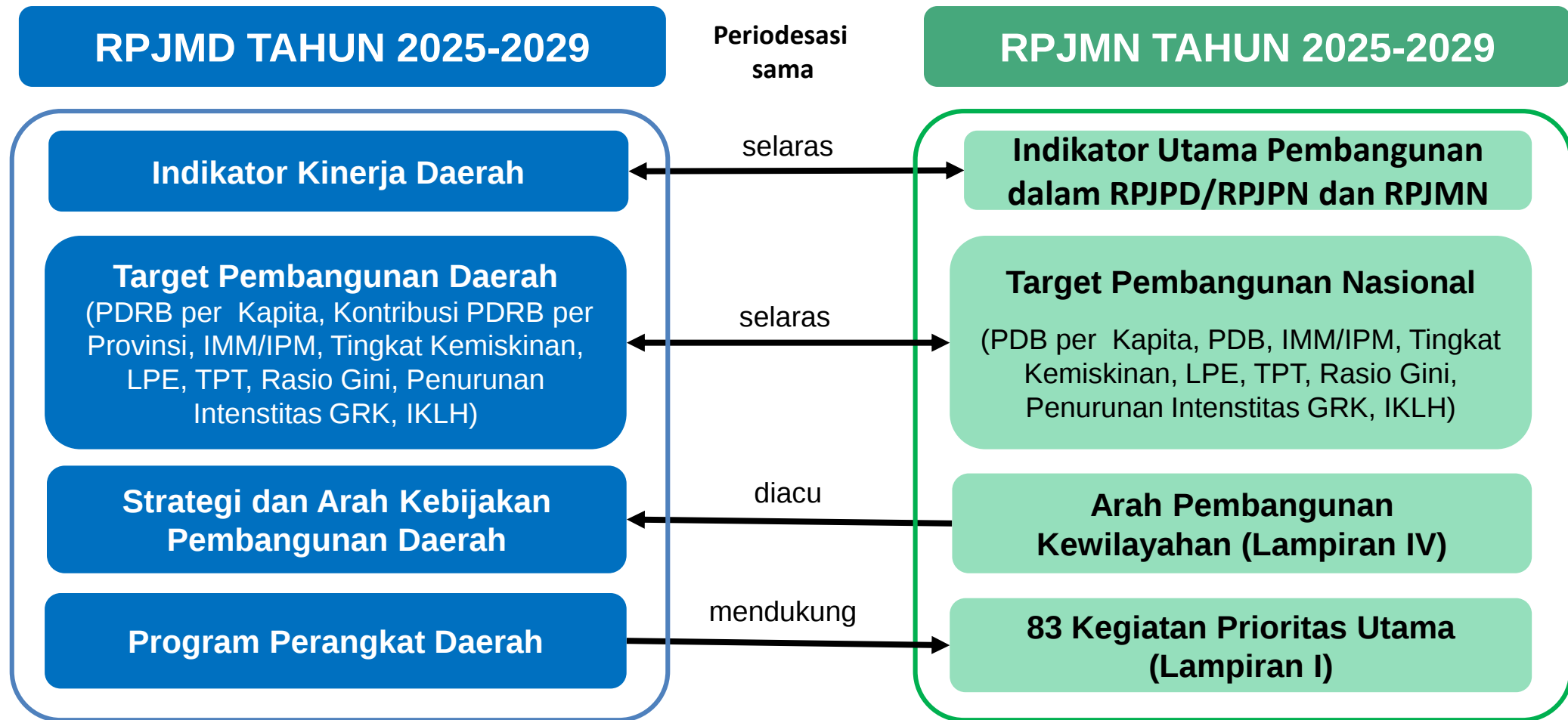
1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Ketua KPU RI;
3. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

3. Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan substansi pada Naskah Akademik RPJMD 2025-2029; dan



GAMBARAN KESELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN TAHUN 2025-2029

DUKUNGAN DAN KESELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN TAHUN 2025-2029



KONTRIBUSI DAERAH TERHADAP PENCAPAIAN TARGET MAKRO



Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	PROVINSI	TAHUN	% RATA- RATA LPE	PDRB PER KAPITA	KONTRIBUSI PDRB PROVINSI	TINGKAT KEMISKINAN	RASIO GINI	INDEKS MODAL MANUSIA	INTENSITAS EMISI GRK	IKLH DAERAH	TPT	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11	DKI Jakarta	2025	6,8-7,9	373,5	16,7	3,55-3,85	0,425- 0,430	0,65	14,65	51,34	5,54-6,40	
		2029		560,8	16,5	2,08-3,08	0,417- 0,421	0,69	22,01	51,98	4,93-5,99	
12	Jawa Barat	2025	6,9-7,9	59,6	12,7	5,85-6,46	0,383- 0,390	0,57	6,61	64,06	6,42-6,99	
		2029		84,9	12,3	2,86-3,86	0,381- 0,383	0,60	8,59	65,07	5,94-6,56	
13	Jawa Tengah	2025	6,7-7,7	51,1	8,2	9,00-9,66	0,362- 0,367	0,61	0,32	75,68	4,42-4,81	
		2029		71,8	7,9	5,21-6,21	0,355- 0,360	0,65	27,57	75,87	3,73-4,49	
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	2025	7,0-8,0	55,1	0,9	10,00-10,50	0,443- 0,447	0,75	62,14	70,49	3,12-3,51	
		2029		78,6	0,8	6,11-7,11	0,436- 0,440	0,79	74,36	71,33	2,83-3,27	
15	Jawa Timur	2025	6,9-8,0	80,7	14,2	7,58-8,08	0,381- 0,386	0,64	1,00	74,17	3,90-4,49	
		2029		114,8	13,7	4,31-5,31	0,369- 0,373	0,68	2,52	74,50	3,26-4,21	
16	Banten	2025	6,8-7,9	74,6	3,9	4,50-5,50	0,344- 0,365	0,56	43,56	66,92	6,87-7,24	
		2029		106,4	3,8	2,42-3,42	0,326- 0,330	0,59	56-65	67,93	6,39-6,82	
17	Bali	2025	7,5-8,5	72,7	1,4	3,57-3,93	0,355- 0,359	0,61	5,36	76,19	1,87-2,35	
		2029		110,9	1,4	1,79-2,79	0,331- 0,335	0,64	26,88	76,89	1,63-2,17	

Sumber: RPJMN 2025-2029, Bappenas, 2025

a) **Urusan Pendidikan**

TUJUAN		Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	
INDIKATOR		1. Skor Literasi/Numerasi 2. Harapan Lama Sekolah 3. Rata-Rata Lama Sekolah	
PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1. Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) 2. Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Draft Kepmendagri IKK
Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	
Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	1. Indeks Pemerataan Guru 2. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	
Pengendalian Perizinan Pendidikan	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	
Pengembangan Bahasa dan Sastra	Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	
Pendidikan Dayah*	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	Khusus Aceh
Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh*	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	Khusus Aceh

REKOMENDASI TUJUAN DAN *OUTCOME* PERANGKAT DAERAH DI DALAM RENSTRA PD

b) **Urusan Kesehatan**

TUJUAN		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	
INDIKATOR		1. Umur Harapan Hidup 2. Indeks Keluarga Sehat (IKS)	
PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI) 2. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Draft Kepmendagri IKK
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	
Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	

INDIKATOR KINERJA DAERAH PADA RPJMD



Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka							
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%							
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita							
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%							
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka							
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%							
7	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang							
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%							
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%							

INDIKATOR KINERJA DAERAH PADA RPJMD



Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%							
2	Tingkat Kemiskinan	%							
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta							
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%							
5	Indeks Gini	Angka							
6	Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia	Angka							Indeks Pembangunan Manusia Untuk Kab/Kota
7	Usia Harapan Hidup	Tahun							
8	Indeks Keluarga Sehat	Angka							
9	Prevalensi Stunting	%							
10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun							

INDIKATOR KINERJA DAERAH PADA RPJMD



Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

III	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Angka Ketergantungan	%							
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%							
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%							
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%							
5	Rasio Kewirausahaan	%							
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%							
7	Indeks Inovasi Daerah	Angka							
8	Indeks Ekonomi Hijau	Angka							
9	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Angka							
10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%							
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka							

INDIKATOR KINERJA DAERAH PADA RPJMD



Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

* Pengisian indikator di atas minimal sesuai dengan Bab II

* Indikator disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan ketersediaan data

IV ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka							
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka							
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka							
4	Indeks Integritas Nasional	Angka							
5	Persentase Penegakan Perda	%							
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%							
7	Indeks Demokrasi Indonesia	%							
8	Indeks Rasa Aman	Angka							
9	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka							
10	Indeks Daya Saing Daerah	Angka							
11	Dst.								
INDIKATOR KINERJA KUNCI									
A	Pendidikan								
1									
2									
	dst.								
B	Kesehatan								



CONTOH FORMAT TEKNIK PERUMUSAN PADA RPJMD DAN RENSTRA PD

TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS DAERAH PADA RPJMD



Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN PADA RPJMD



Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
V/M	T1		T1							
		S1.1	S1.1							
		S1.2	S1.2							
	T2		T1							
		S2.1	S2.1							

TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM PRIORITAS PADA RPJMD



Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
V/M	T1			T1		
		S1.1		S1.1		
			O1.1.1	O1.1.1	PROG. 1	
			O1.1.2	O1.1.2	PROG. 2	
		S1.2		S1.2		
			O1.2.1	O1.2.1	PROG. 3	
			O1.2.2	O1.2.2	PROG. 4	
	T2			T1		
		S2.1		S2.1		

TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS PADA RENSTRA PD



Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN PADA RENSTRA PD



Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	T1		T1							
		S1.1	S1.1							
		S1.2	S1.2							

Dalam penentuan target tahun 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline

TEKNIK MERUMUSKAN P/K/SK PADA RENSTRA PD



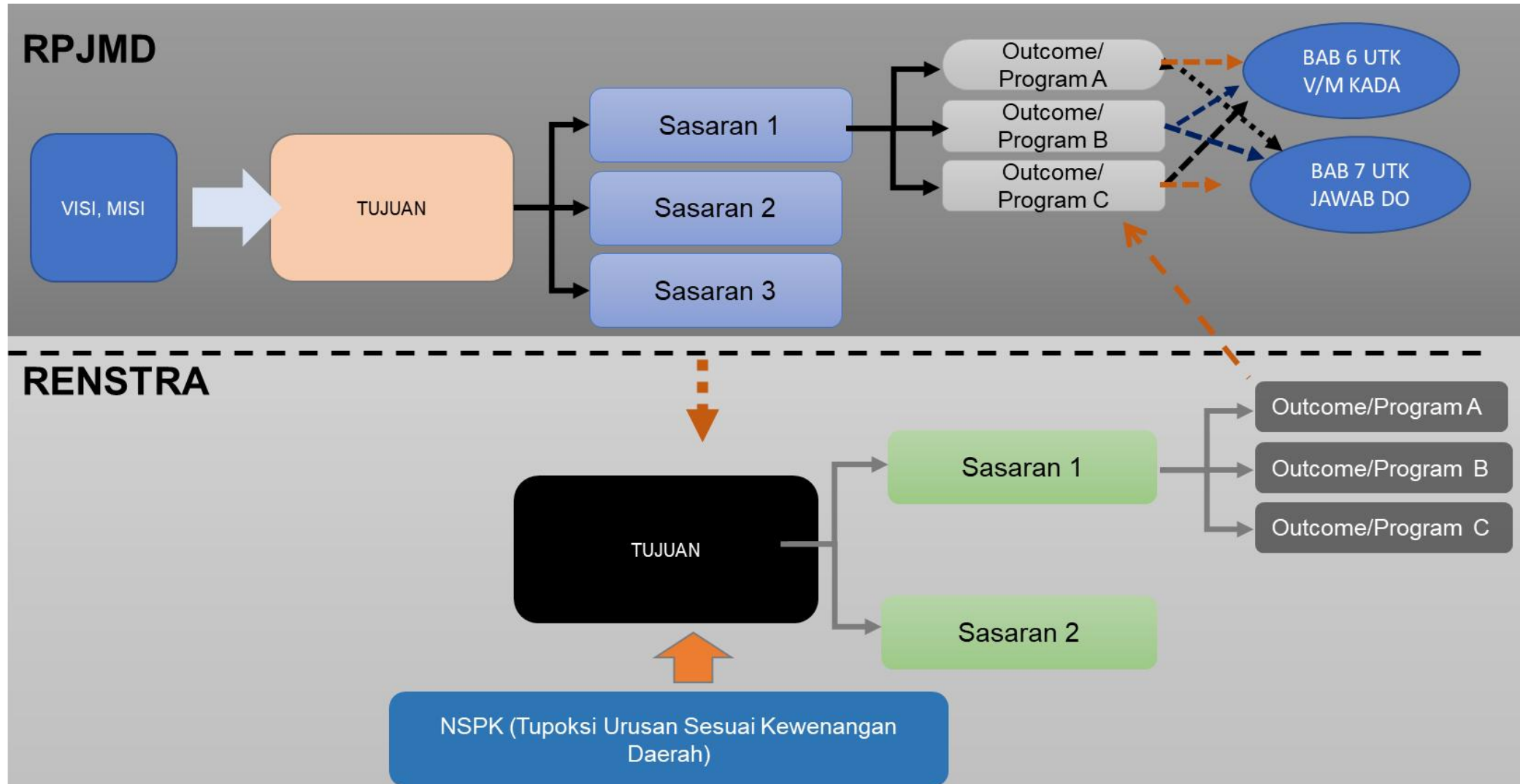
Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	T1				T1		
		S1.1			S1.1		
			OC1.1.1		OC1.1.1	PROG. 1	
				OT1.1.1.1	OT1.1.1.1	KEG. 1.1	
						SUBKEG. 1.1.1	
						SUBKEG. 1.1.2	
				OT1.1.1.2	OT1.1.1.2		
			OC1.1.2		OC1.1.2	PROG. 2	
				OT1.1.2.1	OT1.1.2.1		
				OT1.1.2.2	OT1.1.2.2		
		S1.2					
			O1.2.1				
			O1.2.2				

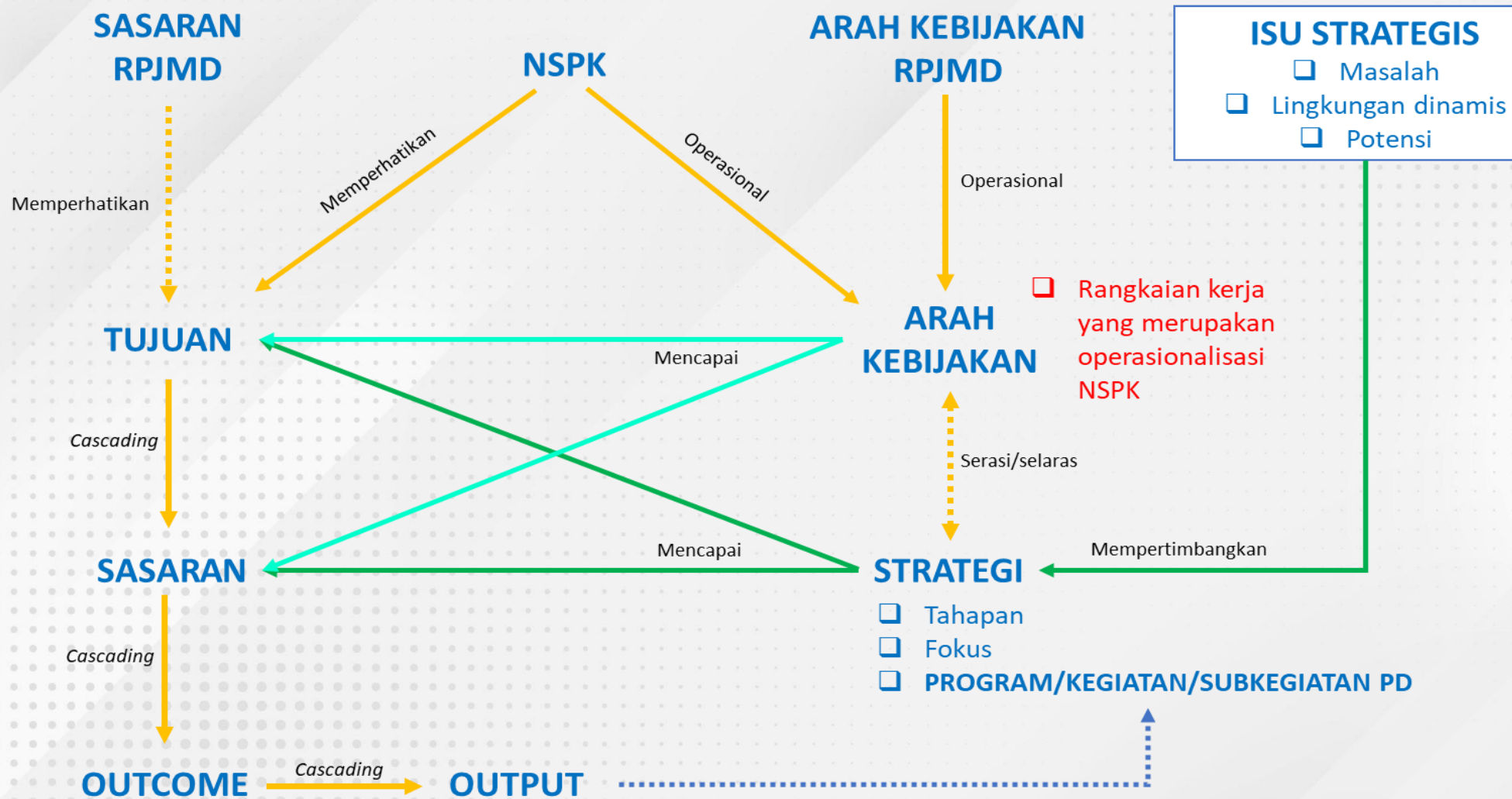


PENYUSUNAN RENSTRA TAHUN 2025-2029

KETERKAITAN RPJMD DAN RENSTRA PD 2025-2029



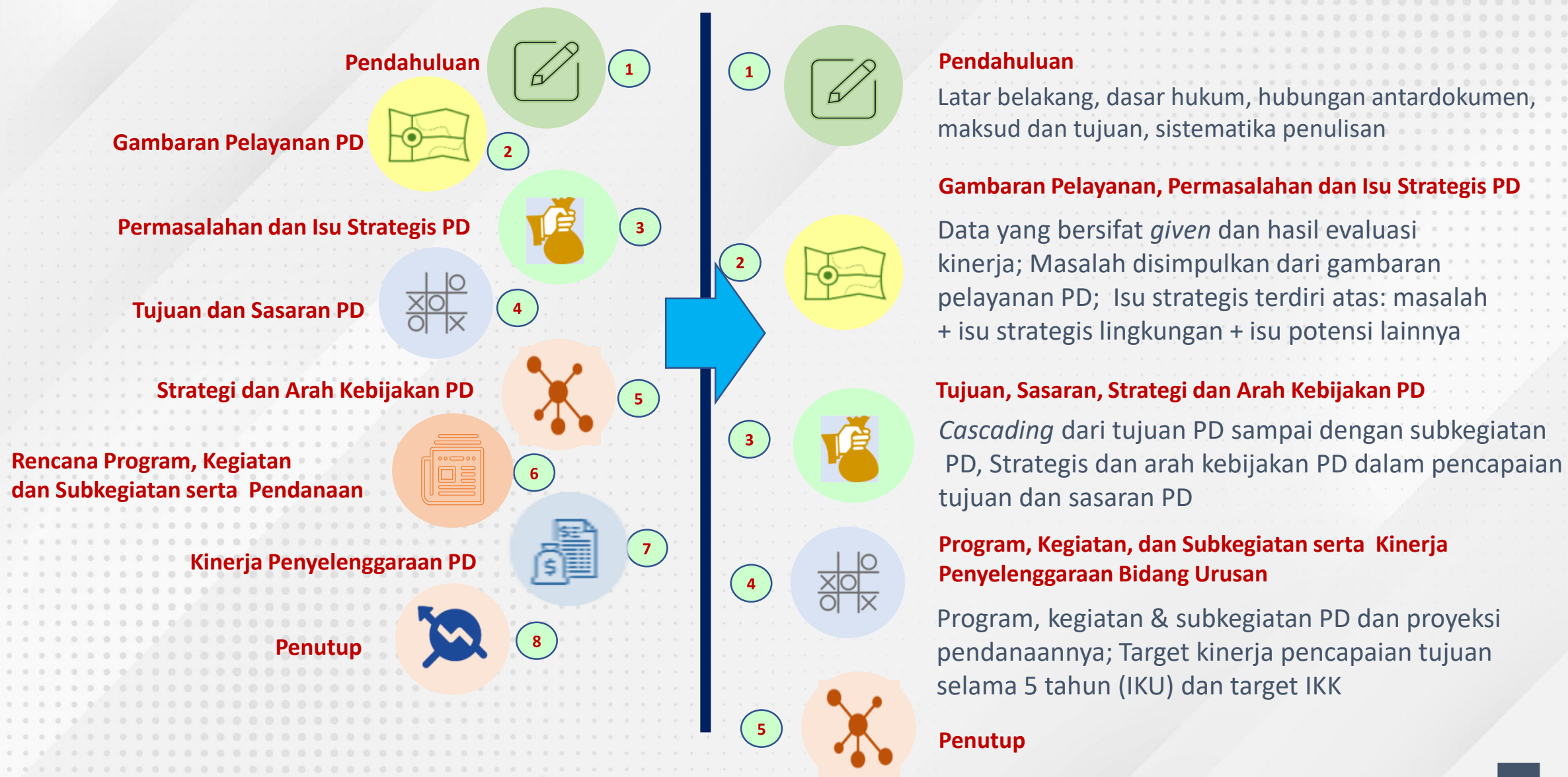
KONSEP PENYUSUNAN RENSTRA PD



SISTEMATIKA RENSTRA PD



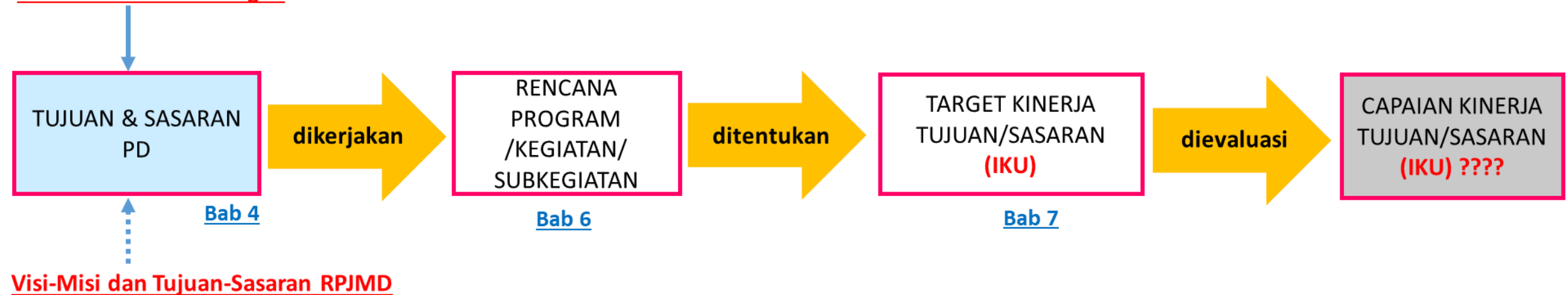
Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH



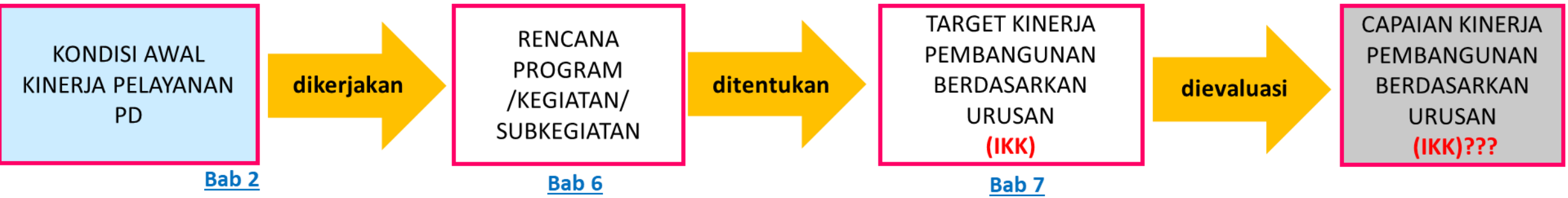
KONSEP KINERJA RENSTRA PD

A Kinerja Kepala Perangkat Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran

NSPK sesuai kewenangan



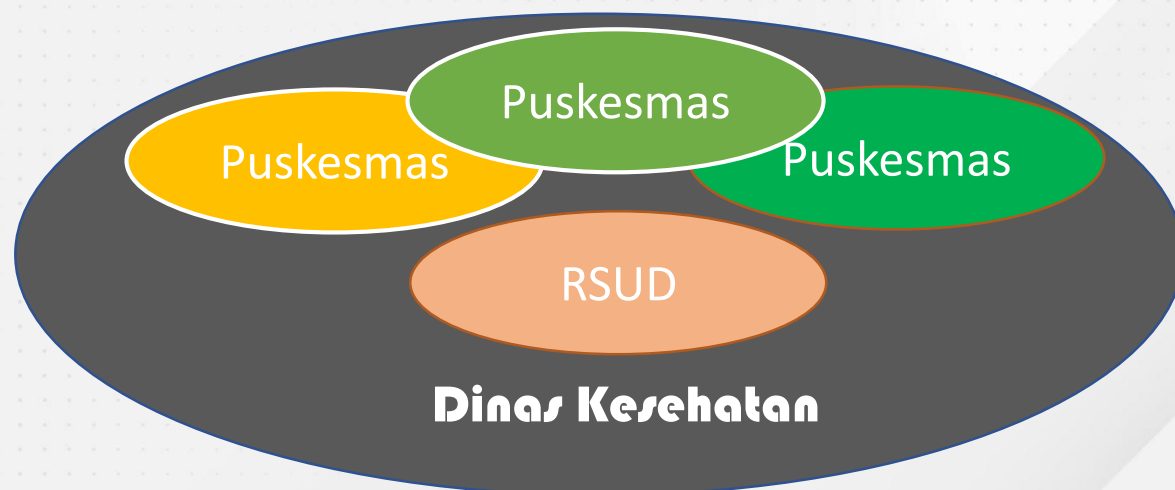
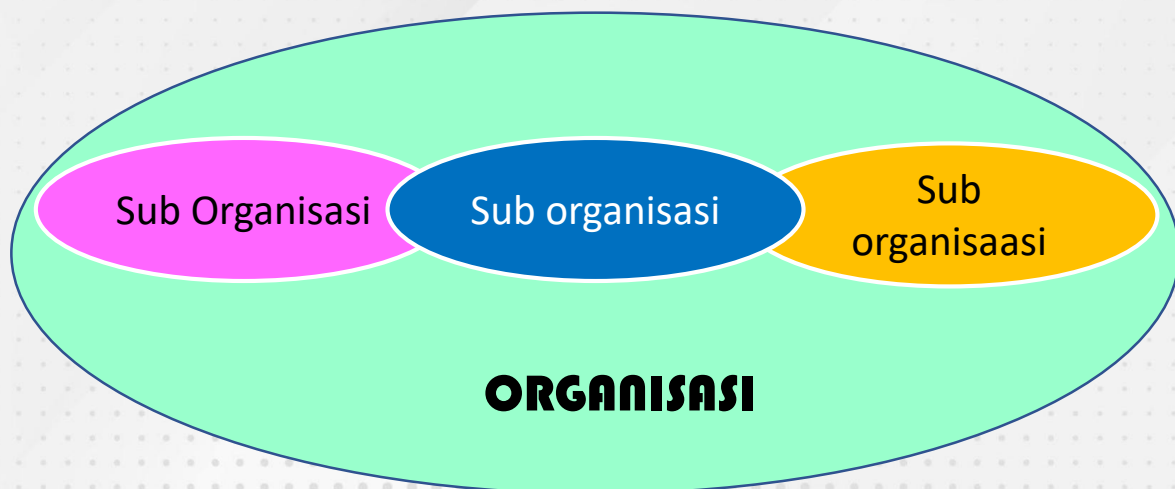
B Kinerja Daerah Berdasarkan Urusan yang Menjadi Tanggung Jawab PD



ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH



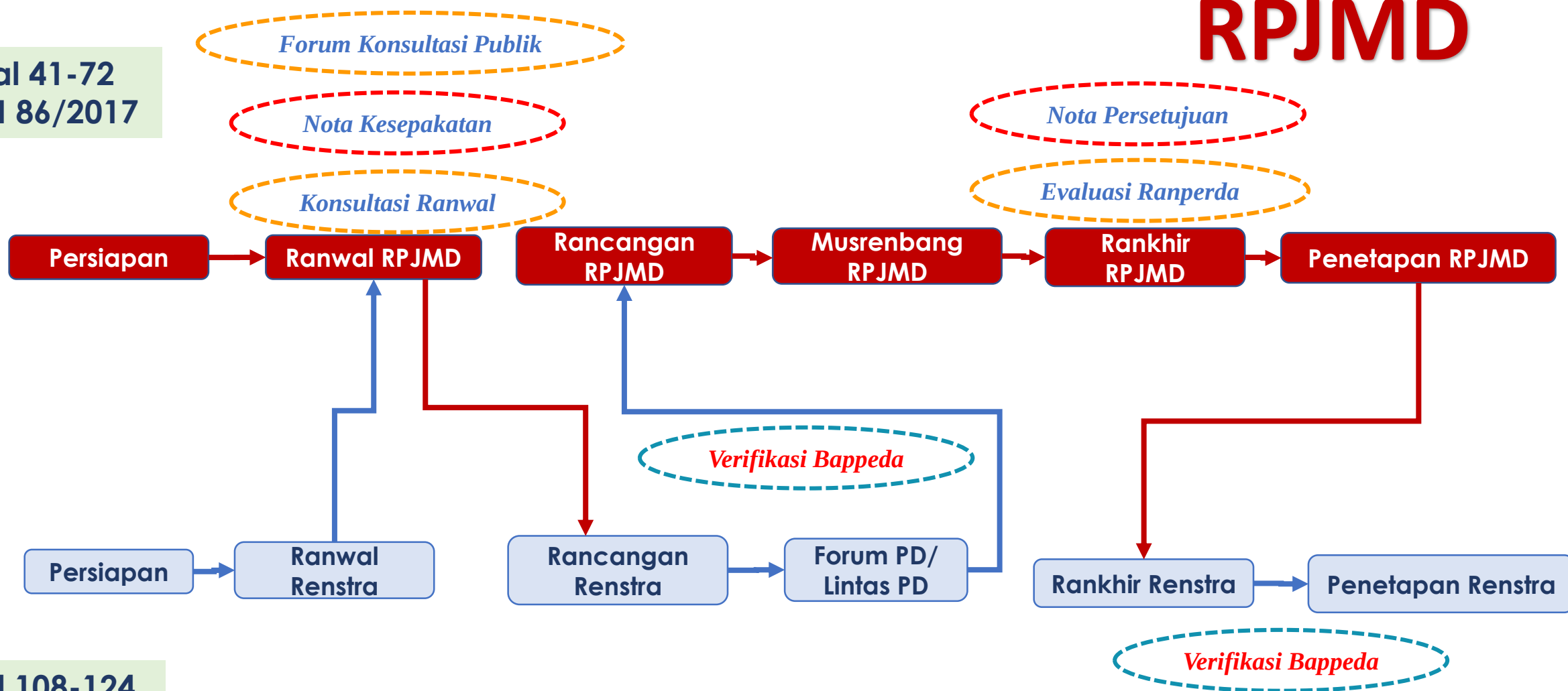
Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH





RPJMD

Pasal 41-72
PMDN 86/2017



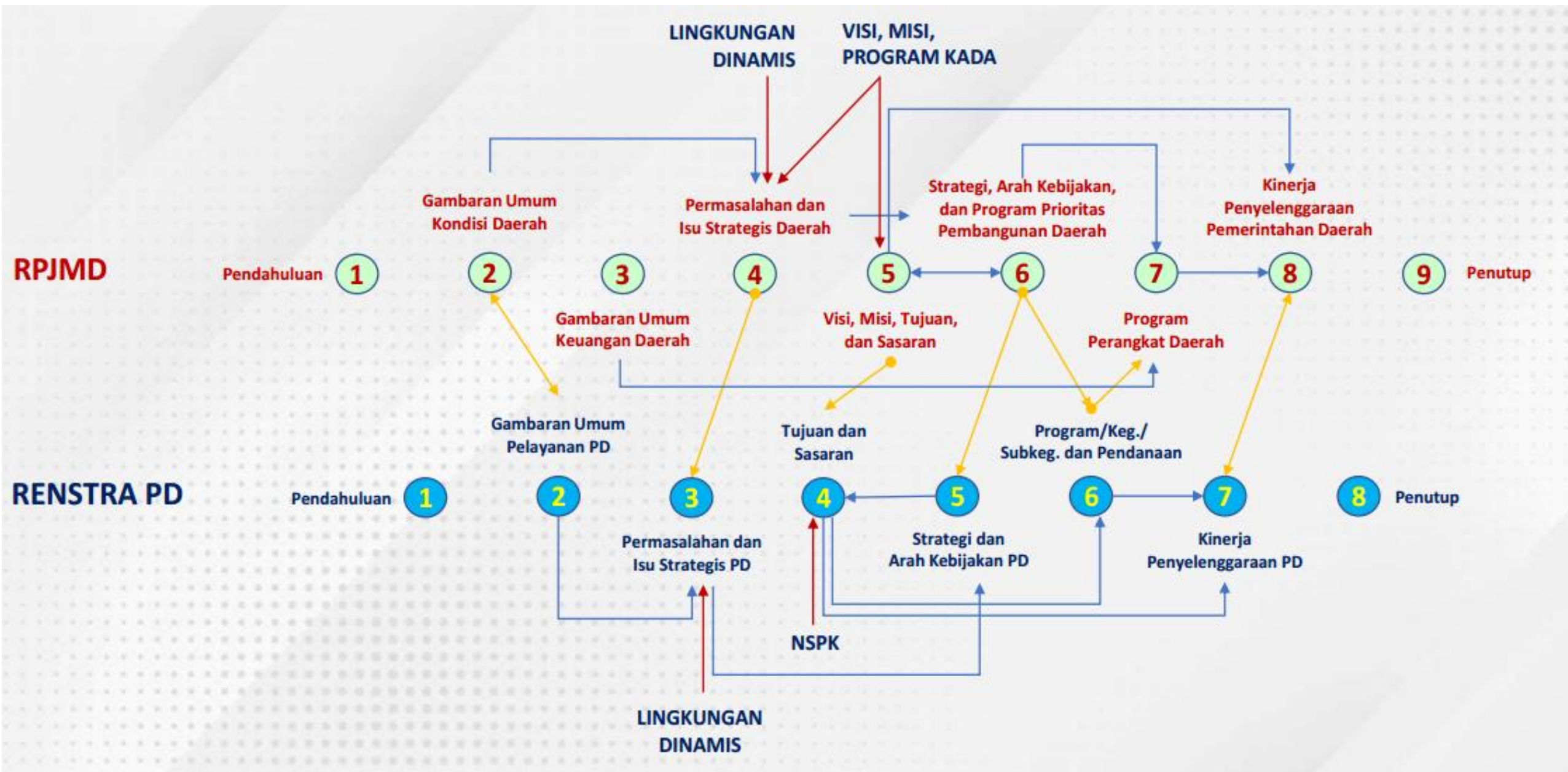
Pasal 108-124
PMDN 86/2017

Renstra PD





KETERKAITAN BAB PER BAB RPJMD DENGAN RENSTRA PD





VERIFIKASI RANCANGAN DAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

1

Verifikasi bertujuan untuk memastikan **rancangan Renstra Perangkat Daerah** telah selaras dengan **rancangan awal RPJMD** dan mengakomodir hasil Berita Acara Forum PD/Lintas PD



Rancangan Renstra PD

Paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah

disampaikan kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD

Penyelesaian verifikasi seluruh rancangan Renstra Perangkat Daerah (termasuk proses penyempurnaannya, paling lambat 2 (dua) minggu sejak penyampaian rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk diverifikasi

efektifitas output dalam menunjang outcome dan program unggulan KDH

2

Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, keg./subkeg pada **rancangan akhir Renstra PD** sudah selaras dengan **Perda RPJMD**



Rancangan Akhir Renstra PD

Paling lambat 1 minggu setelah Perda RPJMD ditetapkan, Rankhir Renstra diserahkan kepada Bappeda

disampaikan kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi sebelum ditetapkan

Penyelesaian verifikasi seluruh rancangan Renstra Perangkat Daerah (termasuk proses penyempurnaannya, paling lambat 2 (dua) minggu sejak penyampaian Rankhir Renstra Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk diverifikasi



VERIFIKASI RENSTRA PD

POIN-POIN	RENSTRA PD	RPJMD	KETERANGAN
Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah	Bab II	Bab II	Termasuk dalam aspek kesejahteraan umum, aspek daya saing, terutama dalam aspek pelayanan umum di RPJMD
Permasalahan dan isu strategis PD	Bab II	Bab II	Selaras dan melengkapi
Tujuan dan sasaran PD	Bab III	Bab III	Pencermatan cascading, dan keselarasan
Strategi dan arah kebijakan	Bab III	Bab III	Keselarasan/operasionalisasi RPJMD
Target kinerja (IKU dan IKK)	Bab IV	Bab IV	Kroscek dengan BA Forum PD/Lintas PD, kesamaan IKK
Program* (+Indikator+Target)	Bab IV	Bab IV	Kroscek Program prioritas Bab III dengan Program PD Bab IV dan Renstra Bab IV. Kroscek dengan BA Forum PD/Lintas PD, kesamaan** (**pada tahun awal)
Kegiatan/Subkegiatan*	Bab IV		Kroscek dengan BA Forum PD/Lintas PD, output dalam menunjang program <i>outcome</i> dan unggulan KDH
Lokasi Subkegiatan	Bab IV		Kroscek dengan BA Forum PD/Lintas PD, ketepatan lokasi (RTRW, program unggulan, Pokir, aspirasi, dll)
Kelompok Sasaran	Bab IV		Kroscek dengan BA Forum PD/Lintas PD (program unggulan, Pokir, aspirasi, dll)
Pagu Anggaran (Indikatif)	Bab IV	Bab IV	Kroscek dengan BA Forum PD/Lintas PD, kesamaan program**



CONTOH KETERKAITAN TUJUAN RENSTRA DENGAN SASARAN RPJMD



TUJUAN

Bidang urusan: sekretariat daerah, perencanaan, keuangan, pengawasan, kepegawaian, dsb

KETERKAITAN PROGRAM PRIORITAS, PROGRAM PD RPJMD DENGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN RENSTRA

BAB III RPJMD

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
UNGGUL DAN BERKELANJUTAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045			
Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Tingkat Kemiskinan	
		Rasio Gini	
		Jumlah Penduduk yang Menerima Bantuan Perlindungan Sosial	
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dalam Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.05 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

BAB IV RPJMD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN					
				TARGET	2026	2027		2028	
					PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
Meningkatnya rehabilitasi sosial pada UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jember	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jember (%)	100	0.002	0.003	2.203.429.433,00	0.003	2.215.642.920,00	0.003	2.259.047.253,00
Meningkatnya rehabilitasi sosial pada UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya (%)	100	0.001	0.001	996.292.766,00	0.001	1.001.815.162,00	0.001	1.021.440.671,00
Meningkatnya rehabilitasi sosial pada Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Sidoarjo	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Sidoarjo (%)	100	0.002	0.008	5.488.994.781,00	0.008	5.519.419.959,00	0.008	5.627.543.113,00
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					179.529.582.049,00		180.524.704.589,00		184.061.174.346,00
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dalam Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	92	92	92	179.529.582.049,00	92	180.524.704.589,00	92	184.061.174.346,00

BAB IV PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (RENSTRA PD)

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

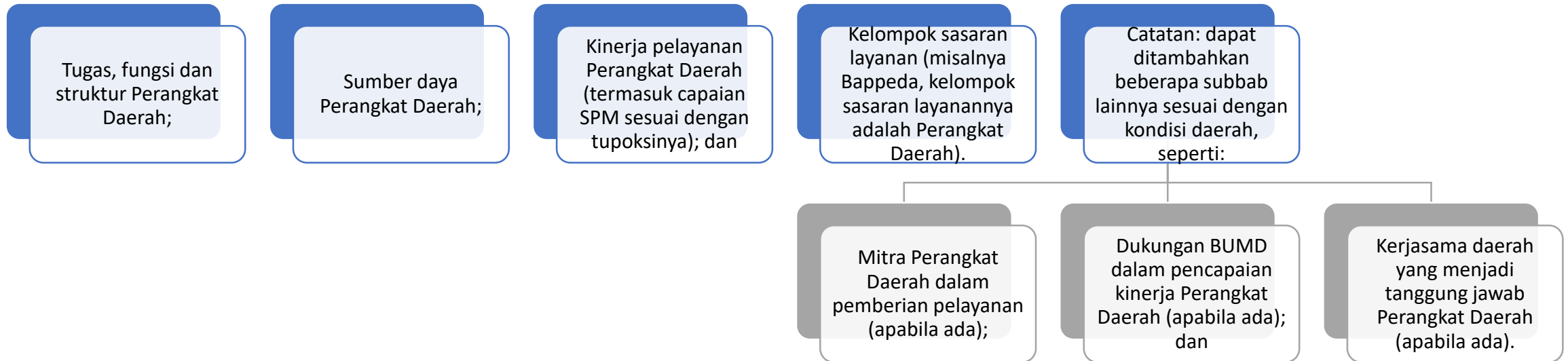
Landasan Hukum

Maksud Dan Tujuan

Sistematika

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS (1)

GAMBARAN PELAYANAN



PERUMUSAN MASALAH

1. **Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD**
2. **Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia**
3. **Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih**

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS (3)

PERUMUSAN ISU STRATEGIS

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

100

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan:

- a. kalimat kondisi;
- b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; dan
- d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan *intermediate outcome*.

[illegible]

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN (2)

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

TAHAP I (2026)	TAHAP I (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN (3)

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA (1)

PERUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	T1				T1		
		S1.1			S1.1		
			OC1.1.1		OC1.1.1	PROG. 1	
				OT1.1.1.1	OT1.1.1.1	KEG. 1.1	
						SUBKEG. 1.1.1	
						SUBKEG. 1.1.2	
				OT1.1.1.2	OT1.1.1.2		
			OC1.1.2		OC1.1.2	PROG. 2	
				OT1.1.2.1	OT1.1.2.1		
				OT1.1.2.2	OT1.1.2.2		
		S1.2					
			O1.2.1				
			O1.2.2				

100

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN

[illegible]

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA (3)

DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Jika diperlukan dapat ditambahkan dua tabel:

Dukungan terhadap prioritas provinsi

Dukungan terhadap prioritas nasional

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA (4)

INDIKATOR KINERJA UTAMA

[illegible]

INDIKATOR KINERJA KUNCI

[illegible]

PENYELARASAN RENSTRA PD TERHADAP RPJMN

SUBSTANSI PENYELARASAN

Perangkat Daerah melakukan dukungan terhadap pencapaian **prioritas nasional (PN)**, **proyek prioritas (ProP)/proyek strategis** dan/atau **highlight arah kebijakan kewilayahan**.

PROSES PENYELARASAN

Penyelarasan dapat dilakukan melalui Musrenbang RPJMD

Sasaran Penyelarasan

Program perangkat daerah mendukung pelaksanaan daftar **83 kegiatan prioritas utama** dan indikasi **77 (Tujuh puluh tujuh)** proyek strategis nasional (Lampiran I) RPJMN Tahun 2025-2029.

Ruang Lingkup/Aspek

Tim penyusun Renstra PD, melakukan analisa penyelarasan dalam rangka mendukung **Asta Cita**, dengan beberapa hal pertimbangan:



Periodisasi



Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama & Proyek Prioritas Nasional



Kinerja tujuan, sasaran, dan outcome yang mendukung RPJMN



Indikator kinerja urusan yang bersifat konkuren beserta targetnya yang mendukung RPJMN dan NSPK



SEKIAN TERIMA KASIH

CONTOH RELATIVITAS *OUTCOME* DALAM RPJMD



Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

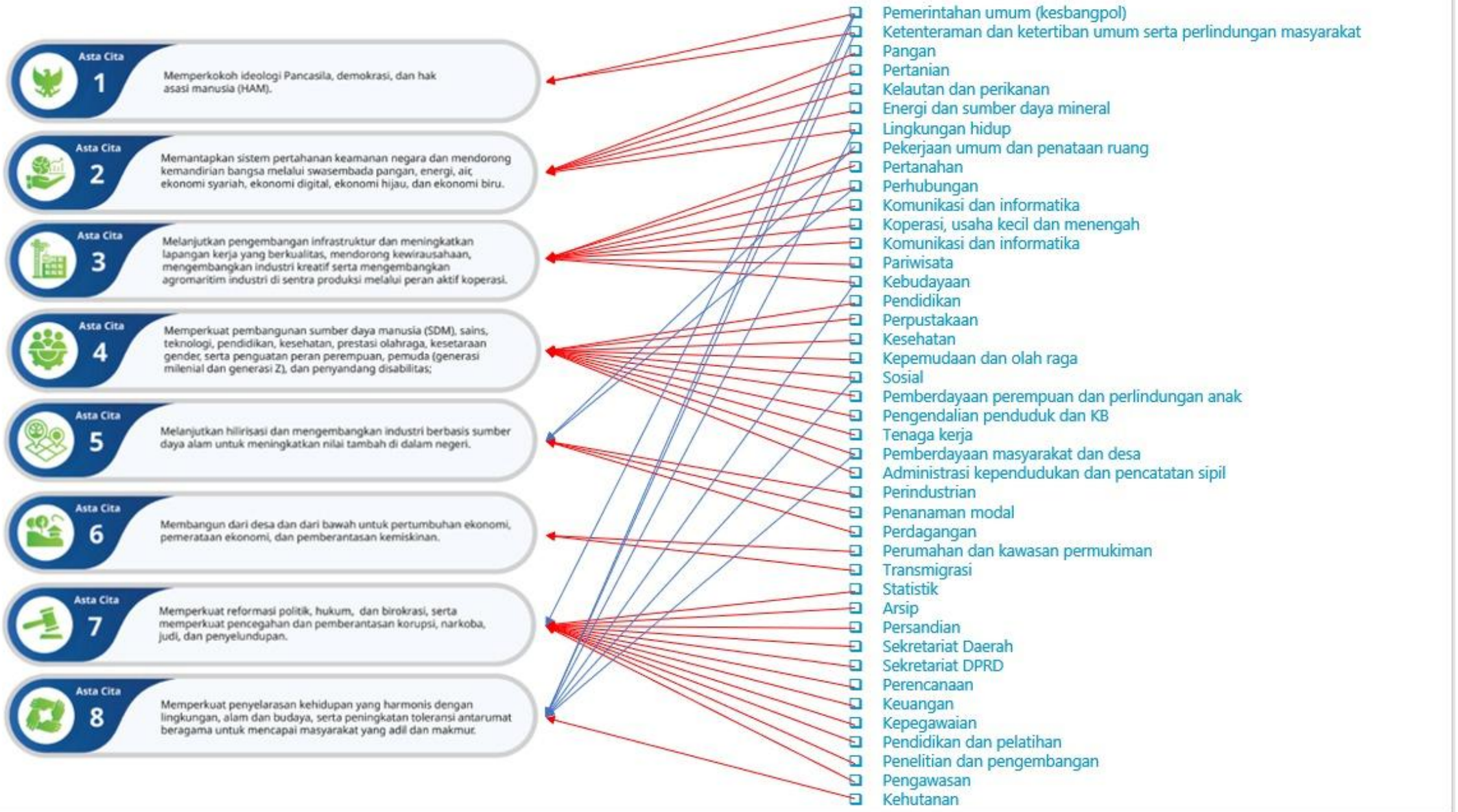
NO	VISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME
1	KOTA X YANG AMAN DAN SEJAHTERA	1. Terciptanya SDM yang unggul dan berkarakter	1. Terciptanya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata	1. Terpenuhinya SPM pendidikan
				2. Meningkatnya literasi masy.
2.	Kota Pendidikan yang Maju dan Sejahtera	1. Terciptanya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata	1. Terpenuhinya SPM pendidikan	1. Tersedianya kelengkapan sarpras sekolah yang memadai 2. Terpenuhinya pendidik dan tendik
			2. Meningkatnya literasi masy.	1. Terpenuhinya bahan bacaan

CONTOH KASUS RENSTRA PD



1. Beberapa bentuk organisasi RSUD yang teridentifikasi sebagai penafsiran dari ketentuan perundang-undangan antara lain: UPT, UOBK, UPT+UOBK, BLUD, dan OPD.
2. UOBK merupakan bagian dari Dinas Kesehatan yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
3. Sesuai ketentuan dalam UU No 23/2004 dan Permendagri No. 86/2017, bentuk organisasi perangkat daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Renstra dan Renja Perangkat Daerah, sehingga UOBK menjalankan Renstra dan Renja Dinas Kesehatan dan tidak memiliki kewajiban menyusun Renstra PD.
4. Beberapa bentuk dokumen perencanaan seperti rencana operasional, rencana strategis bisnis, rencana kerja bisnis, dan rencana kerja UOBK tidak diatur di dalam ketentuan UU No 23/2004 dan Permendagri No. 86/2017, namun diatur di dalam ketentuan regulasi (NSPK) atau kebijakan lainnya.
5. Sesuai pasal 44 PP No. 18/2016, ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah kabupaten/kota serta pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Presiden.

KONTRIBUSI URUSAN TERHADAP ASTA CITA



REKOMENDASI KONTRIBUSI PROGRAM/SUBKEGIATAN (1)



NO.	ASTA CITA	URUSAN	REKOMENDASI PROGRAM	REKOMENDASI SUBKEGIATAN
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan HAM	Pemerintahan Umum	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
			Dst...	Dst...
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
			Dst...	Dst...
		Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara Numerik dan Spasial di Tingkat Provinsi
			Program Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani
			Dst...	Dst...
		Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan 12 (dua belas) mil dan di Perairan Daratan
			Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pelibatan Masyarakat Hukum Adat, Lokal, dan Tradisional yang Hidup di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut
			Dst...	Dst...
		Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan yang Merupakan Barang Milik Daerah
			Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Penelitian dan Pengembangan/Pemasangan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE)
			Dst...	Dst...

REKOMENDASI KONTRIBUSI PROGRAM/SUBKEGIATAN (2)



NO.	ASTA CITA	URUSAN	REKOMENDASI PROGRAM	REKOMENDASI SUBKEGIATAN
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pekerjaa Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Jalan
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
			Dst...	Dst...
		Pertanahan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
			Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Koordinasi Pengusulan TORA Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
			Dst...	Dst...
		Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
			Dst...	Dst...
		Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Penyediaan Akses Internet
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pembinaan dan Fasilitasi Start-Up digital di Wilayah Provinsi
			Dst...	Dst...
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
			Dst...	Dst...
		Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik
			Dst...	Dst...

REKOMENDASI KONTRIBUSI PROGRAM/SUBKEGIATAN (3)



NO.	ASTA CITA	URUSAN	REKOMENDASI PROGRAM	REKOMENDASI SUBKEGIATAN
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
			Program Pengelolaan Pendidikan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
			Dst...	Dst...
		Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi
			Program Pembinaan Perpustakaan	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
			Dst...	Dst...
		Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengembangan Rumah Sakit
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Dst...	Dst...
		Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi
			Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi
			Dst...	Dst...
		Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Dst...	Dst...
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Advokasi Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Atau Hukum, atau Sosial, dan atau Ekonomi Kewenangan Provinsi
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
			Dst...	Dst...
		Pengendalian Penduduk dan KB	Program Pengendalian Penduduk	Penguatan Pengelolaan Kelompok Kerja Bangga Kencana yang Efektif
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
			Dst...	Dst...
		Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

REKOMENDASI KONTRIBUSI PROGRAM/SUBKEGIATAN (4)



NO.	ASTA CITA	URUSAN	REKOMENDASI PROGRAM	REKOMENDASI SUBKEGIATAN
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dst...	Dst...
			Program Pencatatan Sipil	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
			Dst...	Dst...
	Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
			Dst...	Dst...
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam
			Dst...	Dst...
	Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
			Program Pengembangan Ekspor	Peningkatan Citra Produk Ekspor
			Dst...	Dst...
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman
			Dst...	Dst...
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis
			Dst...	Dst...

REKOMENDASI KONTRIBUSI PROGRAM/SUBKEGIATAN (5)



NO.	ASTA CITA	URUSAN	REKOMENDASI PROGRAM	REKOMENDASI SUBKEGIATAN
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Transmigrasi	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi
			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman
			Dst...	Dst...
		Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral dalam Sistem Statistik Nasional
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
			Dst...	Dst...
		Arsip	Program Pengelolaan Arsip	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN
			Program Pengelolaan Arsip	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis
			Dst...	Dst...
		Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
			Dst...	Dst...
		Sekretariat Daerah	Program Penataan Organisasi	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
			Program Penataan Organisasi	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
			Dst...	Dst...
		Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dprd	Pembahasan APBD
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dprd	Pengawasan Penggunaan Anggaran
			Dst...	Dst...
		Perencanaan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
			Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
			Dst...	Dst...
		Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS



REKOMENDASI KONTRIBUSI PROGRAM/SUBKEGIATAN (6)



NO.	ASTA CITA	URUSAN	REKOMENDASI PROGRAM	REKOMENDASI SUBKEGIATAN
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
			Dst...	Dst...
			Program Kepegawaian Daerah	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
		Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
			Dst...	Dst...
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
		Pendidikan dan Pelatihan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
			Dst...	Dst...
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
		Pnelitian dan Pengembangan	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset
			Dst...	Dst...
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
		Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
			Dst...	Dst...
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Kehutanan	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
			Program Pengelolaan Hutan Adat	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat
			Dst...	Dst...
		Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Provinsi
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
			Dst...	Dst...

REKOMENDASI KONTRIBUSI PROGRAM/SUBKEGIATAN (7)



NO.	ASTA CITA	URUSAN	REKOMENDASI PROGRAM	REKOMENDASI SUBKEGIATAN
		Kebudayaan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengembangan Cagar Budaya
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pemanfaatan Cagar Budaya
			Dst...	Dst...
		Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
			Dst...	Dst....

